

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Nur rizqikah¹, Chairul Adhim², Syafrudin³

^{1,3}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

²Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 19, 2026

Revised Jul 11, 2026

Accepted Jul 22, 2026

Keywords:

Information System;
HR Competence;
Internal Control;
Report Quality;
Accountability.

ABSTRACT

This study aimed to investigate the effect of the Regional Government Information System and human resource competence on the quality of local government financial reports, mediated by the Government Internal Control System. The research addressed the persistent challenges and fluctuating audit opinions regarding financial report quality in Dompu Regency despite existing technological interventions. A quantitative explanatory survey approach was employed, utilizing a saturated sample of fifty civil servants directly involved in financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Dompu Regency. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling. The results showed that the utilization of the regional information system had a positive and significant direct effect on both the quality of financial reports and the internal control system. Human resource competence positively influenced internal control but lacked a significant direct impact on financial report quality. Furthermore, the internal control system significantly improved financial report quality and partially mediated the effect of the information system. The study concluded that optimizing information technology required an effective internal control mechanism to truly transform technical utilization into optimal financial accountability.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nur rizqikah,

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali 1 Dompu.

Email: nurrizqikah28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tinggi menjadi tolak ukur utama akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana publik. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami, sehingga layak sebagai dasar keputusan, evaluasi kinerja, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih berhadapan dengan tantangan yang signifikan. Dalam IHPS II Tahun 2024, BPK RI melaporkan bahwa dari total 611 LKPD yang diaudit, hanya 474 LKPD (77,58%) mendapatkan opini WTP, sedangkan 118 LKPD (19,31%) WDP, 13 LKPD (2,13%) TMP, dan 6 LKPD (0,98%) TW (TW) (Suprayitno, 2017). Sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu juga berhadapan dengan

permasalahan yang mirip. Hasil audit BPK mengindikasikan bahwa LKPD Kabupaten Dompu mengalami perubahan opini, dengan opini WDP pada tahun 2020 dan berhasil meraih opini WTP pada tahun 2021-2022. Hal ini menandakan bahwa meski telah ada peningkatan, sistem pengelolaan keuangan masih memiliki potensi kelemahan yang harus diperbaiki demi menjaga konsistensi mutu laporan keuangan.

Penelitian terdahulu telah menemukan sejumlah faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah sistem informasi pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan seluruh tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam platform tunggal. Penggunaan SIPD diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi dalam penyusunan laporan keuangan (Hardianti, 2025). Menurut (April Dwi Wulandari, 2023) penerapan sistem informasi keuangan yang optimal berperan besar dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan. Temuan ini juga didukung oleh (Elisye Lumuly, 2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi dan efektivitas SIPD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (Fitriasari, 2024) juga membuktikan bahwa penerapan aplikasi SIPD beserta kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. Selain teknologi informasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting sebagai faktor penentu laporan keuangan yang berkualitas. Pegawai dengan kompetensi yang memadai dapat memahami standar akuntansi pemerintahan, mengoperasikan sistem informasi secara optimal, serta mengelola data keuangan dengan akurat (Gasperz, 2019). (Saputro et al., 2025) menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi SDM akuntansi menjadi faktor penyebab mendasar rendahnya kualitas laporan keuangan di sejumlah daerah. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Naida, 2024) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memperkuat pengaruh penerapan SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan dalam satu platform, sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses pengendalian internal yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. SPIP menjadi mekanisme kontrol yang memverifikasi kesesuaian proses pengelolaan keuangan dengan ketentuan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih terpercaya. SPIP yang efektif mampu memperkuat pengaruh positif dari pemanfaatan SIPD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan (Rahmawati et al., 2022). (Katili et al., 2025) signifikan pada kualitas laporan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian. Oleh karena itu, SPIP diduga berfungsi sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara SIPD dan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan. Ketidaksepakatan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh pemanfaatan SIPD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya faktor kontekstual atau variabel intervening yang belum dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan membangun model struktural yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut serta menguji peran mediasi SPIP secara spesifik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, telah menerapkan SIPD sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan kendala dalam penerapan SIPD, termasuk fitur sistem yang belum dimanfaatkan secara optimal, kompetensi SDM yang terbatas dalam pengoperasian dan pemahaman regulasi akuntansi pemerintahan yang terus berubah, serta implementasi SPIP yang belum konsisten dan efektif. Kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan kajian empiris mendalam untuk mengungkap mekanisme dampak dan rekomendasi solusi yang tepat.

Berdasarkan fenomena empiris dan gap penelitian yang ada, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh SIPD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan dengan

SPIP di BPKAD Kabupaten Dompu. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan kajian akuntansi sektor publik dan kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Fred D. (Davis F. , 1989) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). TAM menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh individu dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Perceived usefulness didefinisikan sebagai tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sementara perceived ease of use merujuk pada tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem tersebut tidak memerlukan usaha yang berlebihan (Davis F. , 1989)

Dalam penelitian ini, TAM digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan SIPD oleh aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi persepsi kemudahan dan manfaat SIPD oleh penggunanya, semakin besar tingkat pemanfaatannya, yang akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan (Etika Hairani Amri, 2026).

Teori Kontingensi (Contingency Theory)

Menyatakan bahwa efektivitas sistem manajemen sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi dalam organisasi. Teori Kontingensi digunakan di penelitian ini untuk menjelaskan bahwa efektivitas SIPD dan kemampuan SDM pada kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kekuatan SPIP sebagai faktor kondisional. SPIP yang efektif menciptakan lingkungan kondusif sehingga pemanfaatan SIPD dan kompetensi SDM dapat berjalan optimal dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Pengaruh Pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, merupakan platform terintegrasi berbasis web yang menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan pemanfaatan SIPD yang tepat, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan lewat otomatisasi proses akuntansi, integrasi data lintas unit, minimalisasi kesalahan manual, dan peningkatan akurasi serta kecepatan informasi keuangan. Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi bergantung pada persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), yang akhirnya memengaruhi kinerja pengguna dalam menghasilkan output berkualitas. Penggunaan SIPD mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari BKPSDM. Secara keseluruhan, laporan tersebut lebih relevan karena data tersedia secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari aspek reliabilitas, laporan menjadi lebih akurat karena SIPD secara otomatis memvalidasi data yang dimasukkan (Silvia Hardianti Manik et al., 2025). Penelitian (Wulandari & Yuliati, 2023) membuktikan bahwa SIPD yang diterapkan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Jember. Temuan serupa diperkuat oleh (Lumuly & Atarwaman, 2024) yang menunjukkan bahwa penerapan dan keefektifan SIPD berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Kota Ambon. Penelitian (Iswahyudi M. S., & Wote, 2023) menegaskan pengaruh signifikan aplikasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. (Naida, 2024) juga menegaskan bahwa penerapan SIPD secara positif memengaruhi kualitas laporan keuangan melalui optimalisasi sistem informasi pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam konteks keuangan daerah, kompetensi SDM merujuk pada kemampuan pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan guna melaksanakan pengelolaan

serta pelaporan keuangan dengan efektif. (Rahmawati et al., 2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM merupakan ciri dasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kinerja yang efektif atau lebih baik dalam pekerjaan. SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, standar pelaporan keuangan, regulasi daerah, dan sistem informasi keuangan akan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Menurut (Saputro et al., 2025), SDM yang berkompeten menghasilkan laporan keuangan relevan, andal, dan on-time. Pegawai berkompetensi tinggi mampu mengaplikasikan SAP secara benar, memaksimalkan sistem informasi, serta mendeteksi dan mengurangi kesalahan penyusunan laporan keuangan. (Saputro et al., 2025) dan (Gasperz, 2019) membuktikan bahwa kompetensi SDM menjadi faktor penentu utama kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Naida, 2024) kompetensi sumber daya manusia mempertegas dampak SIPD serta SPIP pada kualitas laporan keuangan. (Iswahyudi M. S., & Wote, 2023) membenarkan kontribusi signifikan kompetensi SDM terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pemanfaatan SIPD terhadap SPIP

Pemanfaatan yang optimal terhadap SIPD, tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan secara langsung, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi SPIP pada pemerintah daerah. SIPD yang dirancang dengan pengendalian internal yang baik telah menyematkan kontrol otomatis, seperti otorisasi elektronik untuk persetujuan transaksi oleh pihak berwenang, jejak audit yang mencatat semua aktivitas pengguna, pemisahan fungsi terprogram untuk mencegah penyalahgunaan, serta validasi data otomatis guna meminimalkan kesalahan pencatatan. Kontrol bawaan tersebut langsung memperkuat implementasi elemen SPIP, terutama pada aspek pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. SPIP didefinisikan sebagai proses integral dari tindakan dan kegiatan berkelanjutan oleh pimpinan serta seluruh pegawai untuk memberikan jaminan memadai pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan yang efektif-efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PEMERINTAH, 2008). SPIP terdiri dari lima unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Penelitian (Rahmawati et al., 2022) menunjukkan bahwa SPIP yang optimal memperkuat efek faktor lain pada kualitas laporan keuangan. Menurut (Etika Hairani Amri, 2026); (Heinrich & Probohudono, 2023). (Naida, 2024) membuktikan bahwa SIPD secara positif dan signifikan memengaruhi SPIP, sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap SPIP

Kompetensi SDM tidak hanya berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, melainkan juga mendorong keberhasilan penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. SDM yang berkompeten memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengendalian internal, prosedur pengendalian yang harus dilaksanakan, serta cara mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat menghambat tujuan sebuah organisasi. Pengetahuan yang cukup mengenai regulasi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan memungkinkan pegawai dapat memahami makna serta tujuan prosedur pengendalian dalam SPIP. Menurut PP 71/2010 tentang SAP, kualitas laporan keuangan daerah dinilai dari relevan, andal, comparable, dan dapat dipahami. Keterampilan teknis pegawai memfasilitasi pengendalian yang akurat mulai dari rekonsiliasi, verifikasi dokumen, hingga pengawasan anggaran. Selain memiliki Sikap yang profesionalisme serta integritas, pegawai yang termasuk dalam kompetensi ikut berkontribusi untuk membentuk lingkungan pengendalian yang kondusif sebagai elemen fundamental pertama terhadap SPIP. (Gasperz, 2019) menyatakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi syarat utama terwujudnya akuntabilitas publik yang sesungguhnya. SDM berkompeten memiliki kemampuan lebih baik dalam memahami prosedur

pengendalian internal, mendeteksi risiko, dan menjalankan kegiatan pengendalian yang sesuai peraturan. Kompetensi SDM yang tinggi memperkuat lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian sebagai unsur utama SPIP (Rahmawati et al., 2022); (Fernandes & Yulita, 2022). Menurut (Naida, 2024) kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara penerapan SPIP dan kualitas laporan keuangan, yang secara tidak langsung menunjukkan dampak kompetensi SDM terhadap pelaksanaan SPIP. (Rahmawati et al., 2022) juga membuktikan bahwa kompetensi SDM secara signifikan mempengaruhi sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP.*

Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

SPIP yang efektif berfungsi melalui kelima unsurnya secara sinergis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Lingkungan pengendalian kondusif membentuk budaya akuntabilitas dan integritas yang mendorong pegawai bekerja sesuai standar serta prosedur yang berlaku. Dengan penilaian risiko yang akurat, organisasi dapat mengenali dan mengantisipasi kesalahan atau penyimpangan potensial sebelum merusak kualitas laporan keuangan. Kegiatan pengendalian memastikan pencatatan transaksi keuangan akurat, lengkap, dan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan data andal sebagai dasar laporan keuangan. Komunikasi informasi yang efektif memastikan data keuangan tersalurkan secara tepat waktu ke pihak berwenang, sementara fungsi pemantauan memastikan prosedur pengendalian dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui SPIP yang efektif, mekanisme pengawasan menjamin akurasi dan ketepatan pencatatan setiap transaksi keuangan. Dengan pengendalian internal yang kuat, risiko error dan fraud dalam pelaporan keuangan dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati et al., 2022); (Heinrich & Probohudono, 2023). Penelitian (Naida, 2024) menunjukkan pengaruh positif serta signifikan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Rahmawati et al., 2022) membenarkan bahwa sistem pengendalian internal sebagai mediator secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan. (Iswahyudi M. S., & Wote, 2023) juga membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal dalam organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: *SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan*

Pengaruh Pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui SPIP

Pemanfaatan SIPD tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui mediasi SPIP. Mekanisme ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pemanfaatan SIPD optimal memperkuat efektivitas SPIP melalui kontrol internal terprogram seperti otorisasi elektronik, jejak audit, dan validasi data otomatis yang mendukung unsur-unsur SPIP. SPIP yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengendalian memadai atas seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, SPIP menjadi penghubung antara pemanfaatan SIPD dan kualitas laporan keuangan. Optimalisasi pemanfaatan SIPD dapat memperkuat pelaksanaan SPIP dengan perbaikan sistem informasi dan komunikasi serta pengawasan otomatis. SPIP yang semakin kuat pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan ini, SPIP berperan sebagai mediator antara SIPD dan kualitas laporan keuangan (Gasperz, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H6: *Pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui SPIP*

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui peran SPIP

Selain pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM juga diduga memengaruhi secara tidak langsung melalui SPIP sebagai variabel mediasi. SDM yang kompeten lebih mampu memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan prosedur SPIP dengan baik berkat pengetahuan memadai tentang tujuan dan mekanisme pengendalian internal. SPIP yang diimplementasikan secara efektif oleh SDM kompeten akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. SDM berkompotensi tinggi mendukung penguatan SPIP dengan pemahaman prosedur pengendalian internal yang lebih baik serta kemampuan pengelolaan risiko. SDM yang kompeten dapat memperkuat SPIP untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas lebih tinggi. Secara sederhana, SPIP menjadi variabel intervening antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan (Fernandes & Yulita, 2022). Penelitian (Rahmawati et al., 2022) membenarkan secara empiris bahwa pengendalian internal memediasi hubungan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan daerah. (Naida, 2024) juga menyatakan bahwa kompetensi SDM memperkuat kontribusi SPIP pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7: *Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui SPIP*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei eksplanatori (explanatory survey research). Populasi penelitian adalah seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Dompu yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, berjumlah 50 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan terjangkau, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh (saturated sampling) atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi yang terbatas sehingga seluruh elemen populasi dapat dilibatkan untuk memperoleh hasil yang lebih representatif dan akurat (Sugiyono, 2023). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kabupaten Dompu, terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah, memiliki masa kerja minimal satu tahun sehingga diasumsikan telah memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku; serta telah menggunakan SIPD dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Ramadhan & Adhim, 2021).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju; 5 = Sangat Setuju). Kuesioner dikembangkan berdasarkan instrumen yang telah divalidasi pada penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks penelitian.

Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) dengan bantuan software Smart PLS 4.0. PLS-SEM dipilih karena: model penelitian bersifat kompleks dengan hubungan mediasi, data tidak mengasumsikan distribusi normal tertentu dan tujuan penelitian bersifat prediktif sekaligus konfirmatori. Evaluasi model mencakup dua tahap: evaluasi outer model (measurement model) dan evaluasi inner model (structural model) melalui uji koefisien jalur, nilai R^2 , dan F^2 . Pengujian efek melalui SPIP dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel (Hair et al., 2022).

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
SIPD (X1)	Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi oleh pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan (Permendagri No. 70/2019).	Kemudahan penggunaan, kemanfaatan sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, dukungan teknis, keamanan dan keandalan sistem
Kompetensi SDM (X2)	Kemampuan aparatur yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam	Latar belakang pendidikan, pemahaman regulasi keuangan,

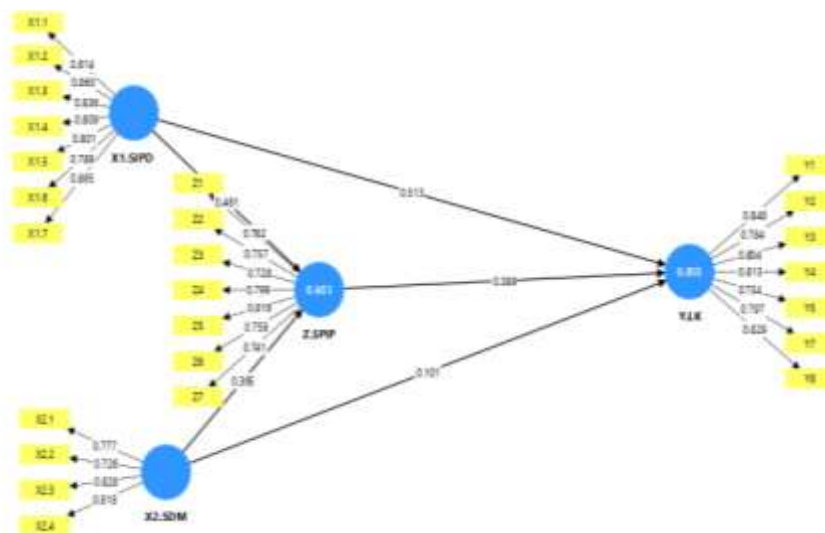
Variabel	Definisi Operasional	Indikator
	menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah secara profesional (Rahmawati et al., 2022)	pengalaman kerja, pelatihan dan pengembangan, kemampuan operasional sistem
SPIP (Z)	Proses pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi (Pemerintah., 2008)	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan yang menyajikan informasi keuangan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71/2010).	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami

Sumber: Penelitian Terdahulu (2026)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Adapun responden penelitian berjumlah 50 orang yang diambil menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus, yang mencakup seluruh elemen populasi pegawai di instansi tersebut. Para responden ini ditetapkan berdasarkan kriteria spesifik, yaitu berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kabupaten Dompu, terlibat langsung dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah (mulai dari perencanaan hingga pelaporan), memiliki masa kerja minimal satu tahun, serta aktif menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Gambar 1. Path Analysis



Tabel 2. Construct Reliability dan Convergent Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
SIPD (X1)	0.922	0.926	0.937	0.681
SDM (X2)	0.797	0.804	0.867	0.621
LK (Y)	0.907	0.910	0.926	0.643
SPIP (Z)	0.885	0.890	0.910	0.592

Sumber: SmartPLS (2026).

Berdasarkan Tabel 2, seluruh konstruk penelitian memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen yang dipersyaratkan. Nilai Cronbach's Alpha pada semua konstruk berada di atas ambang batas 0,70, yakni SIPD (0,922), Kompetensi SDM (0,797), Kualitas Laporan Keuangan (0,907), dan SPIP (0,885), sehingga konsistensi internal instrumen dapat dinyatakan terpenuhi (Hair et al., 2019). Demikian pula, nilai Composite Reliability (ρ_c) untuk seluruh konstruk melebihi batas minimum 0,70, dengan rentang nilai antara 0,867 hingga 0,937, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki keandalan yang memadai sebagai pengukur konsep latennya.

Validitas konvergen dinilai melalui nilai AVE yang mensyaratkan nilai minimum 0,50 (Hair et al., 2019). Hasil analisis menunjukkan bahwa AVE seluruh konstruk telah memenuhi syarat tersebut, dengan SIPD (0,681), Kompetensi SDM (0,621), Kualitas Laporan Keuangan (0,643), dan SPIP (0,592). Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh variansi pada setiap konstruk dijelaskan oleh indikator-indikatornya sendiri, sehingga validitas konvergen dapat dinyatakan terpenuhi untuk seluruh variabel penelitian.

Tabel 3. Discriminant Validity (Heterotrait-Monotrait Ratio / HTMT)

	X1.SIPD	X2.SDM	Y.LK	Z.SPIP
SIPD				
SDM	0.874			
LK	0.952	0.899		
SPIP	0.802	0.841	0.931	

Sumber: SmartPLS (2026).

Sebagian besar nilai HTMT antar-konstruk berada di bawah ambang batas 0,90. Namun demikian, terdapat dua pasangan konstruk yang menunjukkan nilai HTMT melampaui atau mendekati batas tersebut, yaitu pasangan SIPD–Kualitas LK (0,952) dan SPIP–Kualitas LK (0,931). Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan diskriminan antara konstruk-konstruk tersebut, yang secara konseptual dapat dijelaskan oleh keterkaitan inheren antara SIPD, SPIP, dan kualitas laporan keuangan dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah. SIPD dan SPIP merupakan instrumen dan mekanisme yang secara langsung dan simultan membentuk kualitas laporan keuangan, sehingga tumpang tindih persepsi responden terhadap ketiga konstruk ini bersifat logis dan dapat dimaklumi dari perspektif teoritis. Keterbatasan ini diakui sebagai limitasi penelitian yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil.

Adapun nilai HTMT pada pasangan SDM–Kualitas LK (0,899) berada tepat di ambang batas, sehingga secara teknis masih dalam batas yang dapat diterima namun memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi. Pasangan konstruk lainnya, yakni SIPD–SDM (0,874), SIPD–SPIP (0,802), dan SDM–SPIP (0,841), seluruhnya berada jauh di bawah ambang batas, sehingga validitas diskriminan untuk pasangan-pasangan tersebut dapat dinyatakan terpenuhi.

Tabel 4. R-Square (R^2)

	R-square	R-square adjusted	Kriteria
LK	0.855	0.845	Kuat
SPIP	0.603	0.586	Moderat

Sumber: SmartPLS (2026).

Hasil analisis menunjukkan bahwa model struktural memiliki daya prediksi yang kuat. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memperoleh nilai R^2 sebesar 0,855 (R^2 adjusted = 0,845), yang berarti bahwa SIPD, Kompetensi SDM, dan SPIP secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 85,5% variansi kualitas laporan keuangan. Nilai ini tergolong sangat tinggi dan mengindikasikan relevansi substantif model yang dibangun. Sementara itu, variabel SPIP (Z) memperoleh R^2 sebesar 0,603 (R^2 adjusted = 0,586), yang tergolong dalam kategori moderat, artinya SIPD dan Kompetensi SDM secara simultan menjelaskan 60,3% variansi implementasi SPIP di BPKAD Kabupaten Dompu. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa model struktural yang dikembangkan memiliki kapasitas prediktif yang memadai untuk kedua variabel endogen.

Tabel 5. F-Square (F^2)

	SIPD	SDM	LK	SPIP
SIPD			0.616	0.223
SDM			0.026	0.139
LK				
SPIP			0.413	

Sumber: SmartPLS (2026).

Hasil analisis f^2 menunjukkan variasi efek yang informatif. Pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas LK memiliki $f^2 = 0,616$ yang tergolong besar, menegaskan bahwa SIPD merupakan prediktor paling dominan dan berkontribusi paling substansial terhadap kualitas laporan keuangan dalam model ini. SPIP terhadap Kualitas LK juga menunjukkan $f^2 = 0,413$ yang tergolong besar, mengonfirmasi peran strategis pengendalian internal sebagai mekanisme yang secara substantif memperkuat kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan SIPD terhadap SPIP memiliki $f^2 = 0,223$ (efek medium), yang mengindikasikan kontribusi bermakna teknologi informasi dalam memperkuat pengendalian internal. Kompetensi SDM terhadap SPIP menunjukkan $f^2 = 0,139$ yang berada di antara kategori kecil dan medium, sedangkan Kompetensi SDM terhadap Kualitas LK memiliki $f^2 = 0,026$ yang tergolong kecil, konsisten dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan tidak adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficients & Specific Indirect Effects*)

Hip.	Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O) / Beta	T-Statistics	P-Values	Keputusan
Pengaruh Langsung					
H1	SIPD -> LK	0.513	3.575	0.000	Diterima
H2	SDM -> LK	0.101	1.128	0.260	Ditolak
H3	SIPD -> SPIP	0.461	3.361	0.001	Diterima
H4	SDM -> SPIP	0.365	2.407	0.016	Diterima
H5	SPIP -> LK	0.389	2.624	0.009	Diterima
Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)					
H6	SIPD -> SPIP -> LK	0.179	2.079	0.038	Diterima
H7	SDM -> SPIP -> LK	0.142	1.688	0.091	Ditolak

Sumber: SmartPLS (2026).

Pengaruh Pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H1)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H1 diterima. Lebih dari itu, besarnya kontribusi pengaruh ini tergolong kuat, menjadikan SIPD sebagai prediktor paling dominan di antara seluruh variabel dalam model penelitian. Temuan ini mengandung makna bahwa semakin optimal pemanfaatan SIPD oleh aparatur BPKAD Kabupaten Dompu, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat, baik dari aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, maupun keterpahaman. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), di mana tingkat pemanfaatan sistem informasi yang tinggi yang didorong oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja pengguna dalam menghasilkan output berkualitas. Dalam konteks SIPD, otomatisasi proses akuntansi, integrasi data lintas unit kerja, validasi data otomatis, serta minimalisasi kesalahan entri manual secara langsung mendorong peningkatan akurasi dan relevansi laporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Silvia Hardianti Manik et al., 2025), (Wulandari et al., n.d.), (Lumuly & Atarwaman, 2024) dan (Iswahyudi M. S., & Wote, 2023)) yang seluruhnya membuktikan pengaruh positif signifikan pemanfaatan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H2)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H2 ditolak. Kontribusi langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan tergolong sangat kecil. Meskipun demikian, penolakan hipotesis ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa kompetensi SDM tidak relevan, melainkan mengandung implikasi teoritis yang lebih dalam. Penolakan hipotesis ini justru menghasilkan temuan yang secara akademis bernilai tinggi dan mendukung kerangka Teori Kontingensi (Contingency Theory). Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan bersifat tidak langsung, yakni dimediasi oleh SPIP sebagai faktor kondisional (lihat pembahasan H7). Dengan kata lain, kompetensi SDM memerlukan wadah institusional berupa pengendalian internal yang efektif agar dapat termanifestasi secara optimal dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Kondisi ini relevan dengan konteks penelitian di mana SPIP berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah kapasitas individual SDM menjadi output organisasional. Temuan ini paralel dengan argumen (Saputro et al., 2025) yang menekankan bahwa kompetensi SDM memerlukan dukungan sistem yang memadai agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan SIPD terhadap SPIP (H3)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP, sehingga H3 diterima. Kontribusi pengaruh ini tergolong bermakna secara substantif, mengindikasikan bahwa pemanfaatan SIPD yang optimal secara langsung memperkuat efektivitas implementasi SPIP di BPKAD Kabupaten Dompu. Secara mekanistik, SIPD yang dimanfaatkan secara optimal mengintegrasikan sejumlah kontrol bawaan (embedded controls) yang secara langsung mendukung unsur-unsur SPIP, antara lain: otorisasi elektronik yang mendukung kegiatan pengendalian, jejak audit (audit trail) yang memperkuat fungsi pemantauan, pemisahan fungsi terprogram yang mendukung lingkungan pengendalian, serta validasi data otomatis yang memperkuat kegiatan pengendalian dan informasi-komunikasi. Oleh karenanya, semakin baik pemanfaatan SIPD, semakin terfasilitasi pula implementasi kelima unsur SPIP. Temuan ini sejalan dengan (Naida, 2024) dan (Etika Hairani Amri, 2026) yang membuktikan bahwa SIPD secara positif dan signifikan memengaruhi efektivitas pengendalian internal pemerintah.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap SPIP (H4)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP, sehingga H4 diterima. Perlu dicatat pula bahwa besarnya pengaruh SIPD terhadap SPIP lebih besar dibandingkan pengaruh kompetensi SDM, yang mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor teknologi memberikan dorongan yang lebih besar terhadap penguatan pengendalian internal dibandingkan faktor sumber daya manusia secara langsung. Temuan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dalam kaitannya dengan tingkat maturitas SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Secara substantif, SDM yang kompeten memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi pengendalian internal, mampu mengidentifikasi dan menilai risiko secara tepat, serta dapat mengimplementasikan prosedur pengendalian sesuai ketentuan. Pengetahuan tentang regulasi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan memungkinkan pegawai untuk memahami makna dan tujuan prosedur SPIP, sehingga kepatuhan terhadap prosedur tersebut bukan sekadar formalitas melainkan dilandasi pemahaman yang benar. Integritas dan profesionalisme SDM juga berkontribusi pada pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif sebagai elemen fundamental pertama SPIP. Temuan ini konsisten dengan (Rahmawati et al., 2022) dan (Fernandes & Yulita, 2022) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM secara signifikan memengaruhi kualitas implementasi sistem pengendalian internal.

Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H5)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H5 diterima. Besarnya kontribusi pengaruh ini tergolong kuat, menegaskan peran strategis SPIP sebagai mekanisme kontrol yang secara substantif berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. SPIP menempati posisi kedua sebagai prediktor

terkuat terhadap kualitas laporan keuangan setelah SIPD. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa SPIP yang efektif bekerja melalui kelima unsurnya secara sinergis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Lingkungan pengendalian yang kondusif membentuk budaya akuntabilitas; penilaian risiko yang sistematis memungkinkan antisipasi terhadap potensi kesalahan pelaporan; kegiatan pengendalian memastikan pencatatan transaksi yang akurat dan sesuai prosedur; informasi dan komunikasi yang efektif memastikan aliran data keuangan yang tepat waktu; serta pemantauan pengendalian intern memastikan konsistensi pelaksanaan prosedur secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengendalian internal yang kuat terbukti meminimalisir risiko error dan fraud dalam pelaporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan (Naida, 2024), (Rahmawati et al., 2022) dan (Iswahyudi M. S., & Wote, 2023) yang seluruhnya membuktikan pengaruh positif signifikan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui SPIP (H6)

Hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui mediasi SPIP, sehingga H6 diterima. Mengingat jalur langsung SIPD terhadap kualitas laporan keuangan H1 juga terbukti signifikan, maka jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial (partial mediation). Hal ini berarti SPIP memperkuat dan melengkapi namun tidak menggantikan pengaruh langsung SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. Secara mekanistik, SIPD yang dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu memperkuat efektivitas implementasi SPIP melalui kontrol-kontrol bawaan sistem, yang kemudian secara berurutan meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengendalian yang lebih baik atas seluruh proses pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, terdapat dua jalur pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan: jalur langsung dan jalur tidak langsung melalui SPIP, sehingga total pengaruh SIPD menjadi lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya semata. Temuan ini konsisten dengan (Gasperz, 2019) yang menjelaskan peran SPIP sebagai mediator antara pemanfaatan sistem informasi dan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui peran SPIP (H7)

Hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui mediasi SPIP pada taraf signifikansi konvensional, sehingga H7 ditolak. Meskipun arah koefisien sesuai ekspektasi teoritis dan nilai signifikansi mendekati ambang batas yang dapat diterima, secara konvensional hipotesis ini tidak dapat diterima. Penolakan H7 perlu diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa faktor kontekstual. Pertama, keterbatasan ukuran sampel yang relatif kecil dapat menyebabkan statistical power yang tidak optimal untuk mendeteksi efek tidak langsung yang secara teoritis lebih kecil dibandingkan efek langsung. Kedua, hasil pengujian yang menunjukkan signifikansi pada jalur SDM → SPIP dan SPIP → kualitas laporan keuangan secara logis mendukung kemungkinan mediasi parsial, namun efek gabungan kedua jalur tersebut tidak cukup kuat untuk mencapai signifikansi statistik dalam sampel yang ada mengisyaratkan bahwa dengan ukuran sampel yang lebih besar, efek mediasi ini berpotensi menjadi signifikan. Ketiga, kemungkinan terdapat variabel moderasi atau kondisi kontekstual lain yang belum dimasukkan dalam model yang memengaruhi jalur mediasi ini. Temuan ini menjadi rekomendasi bagi penelitian lanjutan dengan cakupan sampel yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Pemanfaatan SIPD secara empiris memiliki peran mendasar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu. Sebaliknya, kompetensi SDM terbukti tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang merefleksikan bahwa kapasitas individual aparatur baru dapat termanifestasi secara optimal apabila difasilitasi oleh mekanisme institusional yang memadai. Di sinilah peran SPIP menjadi sangat krusial; sistem pengendalian internal tidak hanya memberikan dampak positif yang signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi juga terbukti mampu memediasi pengaruh pemanfaatan SIPD secara parsial. Hal ini menegaskan bahwa

teknologi informasi hanya dapat diterjemahkan menjadi laporan keuangan yang benar-benar berkualitas apabila difasilitasi melalui pengendalian internal yang efektif dan konsisten.

Kebaruan (novelty) utama dalam penelitian ini terletak pada pembuktian empiris mengenai peran kondisional dan mekanistik SPIP sebagai mediator parsial. Penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan literatur terdahulu yang mayoritas hanya menempatkan SIPD dan kompetensi SDM dalam hubungan langsung terhadap kualitas laporan keuangan tanpa mengeksplorasi jalur transmisinya secara mendalam. Melalui integrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Teori Kontingensi, kajian ini memperkaya literatur dengan memvalidasi bahwa SPIP bukanlah sekadar kewajiban regulatif semata, melainkan instrumen strategis yang secara substantif mentransformasi pemanfaatan teknologi dan kapasitas SDM menjadi kualitas pelaporan yang optimal. Terutama dalam konteks pemerintah daerah yang menghadapi tantangan implementasi sistem dan keterbatasan kompetensi yang unik, temuan ini memberikan justifikasi empiris dan praktis yang kuat bagi BPKAD Kabupaten Dompu untuk memprioritaskan optimalisasi SIPD dan penguatan SPIP secara sinergis guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

REFERENSI

- Etika Hairani Amri, D. (2026). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Berdasarkan Teori Technology Acceptance Model (Tam) Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 4(1), 16–23.
- Fernandes, J., & Yulita, R. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Instansi Pemerintahan Kota Padang. *Jurnal Pundi*, 6(1), 75–88. <https://doi.org/10.31575/Jp.V6i1.393>
- Gasperz, J. (2019). 1594-Article Text-9930-1-10-20210920. *Jefry Gasperz*, 5(2), 40–46.
- Hair, J. F. J., G. Hult, T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., Ray, S., & Partial. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-Sem) Using R*. Classroom Companion: Business. <https://doi.org/10.1007>
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sip) Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Konstelasi: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424. <https://doi.org/10.24002/Konstelasi.V3i2.7150>
- Iswahyudi M. S., & Wote, A. Y. V. (2023). (2023). Manajemen Pendidikan : Konsep, Tantangan, Dan Strategi Di Era Digital. *Pendidikan Era Digital*, 11(2), 79.
- Katili, T. S., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Provinsi Gorontalo*. 6, 1938.
- Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. D. (2024). *Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Sipd Terhadap Kualitas Lkpd Kota Ambon*. 6(2), 147–159.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi Sipd Dan Spip Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi Sdm. *Solusi*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/Slsi.V22i4.10554>
- Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu Nur Kholid, A., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/Jrak.V12i2.21791>
- Ramadhan, M. S., & Adhim, C. (2021). Fraud Detection In The Procurement Of Goods And Services And Services. *Journal Of Contemporary Accounting*, 3(3), 113–129. <https://doi.org/10.20885/Jca.Vol3.Iss3.Art1>
- Saputro, H. G., Aditya, E. M., & Indarti, I. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 27(1), 39–47. <https://doi.org/10.37470/1.27.1.250>
- Silvia Hardianti Manik, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, & Henny Andiyani Wirananda. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. *Jumbiwira : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(3), 125–134. <https://doi.org/10.56910/Jumbiwira.V4i3.3178>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Suprayitno. (2017). Perancangan Model E-Government Terintegrasi Untuk. *Jurnal Bppk*, 10, 62–88.
- Wulandari, A. D., & Yuliaty, A. (2023). The Effect Of Implementing Local Government Information Systems, Internal Control And The Use Of Information Technology On The Quality Of Financial Report (Study On Regional Financial And Asset Management Bodies In Jember District). *Costing: Journal Of*

Economic,Businessandaccounting, 7, 637–649.

Wulandari, A. D., Yuliati, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (N.D.). *The Effect Of Implementing Local Government Information Systems, Internal Control And The Use Of Information Technology On The Quality Of Financial Report (Study On Regional Financial And Asset Management Bodies In Jember District)*.